

## Peluang Libatkan Pihak Ketiga Program Makan Bergizi Gratis Dijadwalkan Bergulir Hari Ini



Sumber gambar: Kaltim Post

Senin, 13/01/2025

Ingin mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) andal serta mengurangi permasalahan tengkes (*stunting*), program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mau digulirkan di Samarinda.

**SAMARINDA** - Dibandingkan daerah lain, program MBG telah berlangsung selama satu pekan di berbagai wilayah Indonesia.

Tujuannya meningkatkan gizi anak-anak dan berharap mendapatkan perkembangan yang optimal. Namun, beragam tantangan serta kendala muncul terlebih tentang koordinasi, infrastruktur, dan pembiayaan.

Beberapa waktu lalu, Komandan Kodim 0901/Samarinda, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra menjelaskan kepada Kaltim Post ihwal *update* persiapan program MBG yang dijadwalkan mulai bergulir hari ini. "Kami mulai dengan tiga titik (dapur) yang sudah siap. Beberapa titik di Samarinda sudah kami petakan secara khusus meski ada beberapa yang masih dalam tahap perbaikan," ujarnya.

"Namun, ketika pada tanggal 13 nanti belum siap, akan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN). Kan sudah ada kepala dapur masing-masing," tegas perwira menengah TNI tersebut. Yusub menegaskan, secara kesiapan baru satu yang siap. "Yang dua belum karena baru penunjukan tanggal 2 lalu. BGN menunjuk lagi dua tempat. Sudah saya cek, secara sarana dan prasarana fasilitasnya belum memungkinkan," tegasnya.

Terkait program tersebut, lanjut dia, semua alat yang digunakan adalah yang sesuai standar dari BGN. "Kami mengkoordinir semuanya agar bisa sejalan sesuai arahan. Mungkin alternatif lain melibatkan pihak ketiga," bebernya. Terkait kuantitas anak yang bisa terakomodir, Yusub menegaskan tinggal dikalikan. "Maksimal satu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) itu ditarget bisa mengkoordinir sampai 3.500 anak. Sementara ada tiga, berarti sekitar 10 ribuan anak," jelasnya.

Samarinda ditunjuk sebagai salah satu lokasi awal pelaksanaan program tersebut dengan tiga titik direncanakan distribusi makanan bergizi kepada anak-anak sekolah di beberapa kecamatan. Termasuk standar operasional prosedur masih penyempurnaan dengan harapan program itu bisa berjalan efektif.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menjelaskan audiensi dengan BGN sudah berjalan beberapa waktu lalu membahas aspek teknis pelaksanaan program tersebut. Pemkot berkomitmen memberikan dukungan penuh termasuk menyiapkan anggaran sebesar 6,5 persen dari APBD 2025 untuk menjamin kelancaran program makan siang gratis. "Pembahasan dengan BGN mencakup teknis di lapangan mulai dari dapur, pengelolaan, hingga pengangkutan makanan," ujarnya.

Untuk saat ini, tiga dapur telah siap mendukung pelaksanaan program. Lokasinya berada di Jalan Suryanata, Jalan Pangeran Antasari, dan Jalan Wahid Hasyim II.

AH mengungkapkan bahwa jumlah dapur tersebut masih belum mencukupi, mengingat kebutuhan ideal di Samarinda adalah sembilan dapur untuk melayani seluruh penerima manfaat. "Kami siap mendukung program itu termasuk menutupi kekurangan anggaran jika diperlukan. Karena sifatnya program nasional, pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendesak atau program strategis daerah," tegasnya.

Selain itu, pelaksanaan program MBG di Samarinda akan melibatkan berbagai pihak termasuk TNI dan Polri untuk memastikan distribusi berjalan lancar. "Intinya program itu semua akan turun tangan untuk mendukungnya," tegasnya. **(dra)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Peluang Libatkan Pihak Ketiga, Program Makan Bergizi Gratis Dijadwalkan Bergulir Hari Ini, 13/01/25
2. Kaltimpost.com, Makan Bergizi Gratis Samarinda, Libatkan Pihak Ketiga, Berapa Satu Porsinya?, 10/03/25

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
  - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
  - b. anak usia di bawah lima tahun;
  - c. ibu hamil; dan
  - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.